

Sugiarto Pramono



FAIR TRADE:

Perdebatan teoritik, praktik dan transformasi



**Wahid Hasyim
University Press**

FAIR TRADE:
Perdebatan teoritik, praktik dan transformasi

Penulis :
SUGIARTO PRAMONO, SIP., MA.

Panata Aksara:
MUHAMMAD DHANI

Desain Cover:
M. ARIF MAULANA

Cetakan Pertama:
5 Januari 2015

Sumber gambar pada sampul:
<http://zahrinalia.wordpress.com/2013/04/28/1-manusia-dan-keadilan/>

Penerbit:
WAHID HASYIM UNIVERSITY PRESS.
JL. MENOREH TENGAH X/ 22 SAMPANGAN SEMARANG
TLP. 0248505680/ FAX: 0248505681

ISBN 978-602-8273-48-0



*Darno dan Daimah, kedua orang tuaku
yang selalu menyebut-nyebut nama ku
dalam setiap doa mereka;
Rosyidah, istriku yang sangat mengenal diriku;
Buah hati kami yang kami harapkan kehadirannya.*

KATA PENGANTAR

Gerakan *fair trade* atau perdagangan yang adil muncul dan bergerak melawan arus utama paradigma perdagangan dominan, *free trade*. Kendati pesimisme sering dihembuskan oleh para penganut liberalisme pasar, karena prinsipnya bertentangan dengan prinsip ekonomi, gerakan ini terus menerjal. Hal ini nampak dari misalnya semakin banyaknya para pelaku ekonomi yang berupaya memasukkan nilai-nilai keadilan dalam aktivitasnya.

Apikri dan D'best furniture menjadi dua contoh menarik yang disuguhkan [di bab 3 dan 4] dalam buku ini [dari sekian banyak kasus yang jumlahnya semakin bertambah] yang berupaya memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Dan menariknya upaya menegakkan nilai-nilai tersebut justru menjadi nilai tambah yang meningkatkan eksport mereka ke Eropa dan Amerika. Buku tipis ini bermaksud mengupas kendati secara garis besar perdebatan teoritik, praktek dan transformasi *fair trade*.

Buku di tangan pembaca ini sejatinya merupakan himpunan tulisan-tulisan penulis yang tersebar diberbagai jurnal ilmiah. Dengan beberapa modifikasi berbagai tulisan tersebut di tata ulang sedemikian rupa sehingga menghasilkan gagasan yang utuh.

Tanpa bantuan dari banyak pihak mustahil rasanya serpihan-serpihan tulisan yang berserakan ini dapat dikumpulkan dan pada akhirnya diterbitkan menjadi sebuah buku seperti yang ada di tangan pembaca ini. Pertama, saya ucapkan pada Ibunda dan Ayahhanda tercinta, Daimah dan Sudarno, yang tidak pernah berhenti menyebut-nyebut nama penulis dalam setiap lantunan doanya. Penulis sangat

berharap, semoga penulis menjadi amal jariah untuk mereka berdua. Amien.

Selanjutnya untuk istriku, wanita terindahku, Rosyidah. Trimakasih untuk keridlaan dan keikhlasanmu dalam menemaniku di hari-hariku. Untuk anakku tercinta yang hingga tulisan ini dibuat belum dikehendakiNya lahir ke dunia ini. Orang tuamu berharap engkau akan lahir sehat *wal ‘afiat* menjadi anak yang bahagia tumbuh dewasa dalam *taqwa* hingga *khusnul khotimah*.

Tak lupa, penulis ucapkan termakasih yang sebesar-besarnya pada rektor Universitas Wahid Hasyim, (UNWAHAS), Dr. H. Noor Achmad, MA yang selalu memberikan motivasi pada penulis untuk selalu berkarya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), UNWAHAS H. Andi Purwono, SIP., MA yang senantiasa menyemangati dan membimbing penulis. Para seniorku di FISIP UNWAHAS, para guru dan sahabat di FISIP UNWAHAS yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi: Bu Ismi, Bu Ana, Pak Agus, Mas Harun Ni’am, Pak Martin, Pak Adib dan Pak Joko; Mas Aji, Mas Adi, Gus Azmi dan Mas Zudi Setiawan. Semoga seberapapun jasa baik kalian pada penulis dibalas Allah swt dengan balasan berlipat-lipat. Amien.

Semarang, 5 Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ iv

DAFTAR ISI ~ vi

BAB I. PENDAHULUAN

BAB 2. *FAIR TRADE*: MAKNA, LATAR BELAKANG,
TANTANGANNYA DAN STRATEGI

BAB 3. *FAIR TRADE* DALAM PETA PERDEBATAN
PERSPEKTIF ARUS UTAMA EPI

BAB 4. PERJUANGAN *FAIR TRADE*:
KASUS APIKRI YOGYAKARTA

BAB 5. PERJUANGAN FAIR TRADE:
KASUS D' BEST FURNITURE
MENSIASATI REZIM *ECO-LABELING*

BAB 6. BELAJAR DARI KASUS
APIKRI DAN D'BEST FURNITURE

BAB 7. TRANSFORMASI *FREE TRADE* MENUJU
FAIR TRADE, MUNGKINKAH?

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS~150

BAB 1

PENDAHULUAN¹

Praktek perdagangan memiliki usia yang seumur dengan peradaban umat manusia. Sebelum ditemukan mata uang, manusia melakukan barter, yakni tukar menukar barang, untuk memenuhi kebutuhannya. Pada perkembangannya seiring dengan ditemukannya alat tukar uang jual beli menggantikan praktik barter.

Pada level yang lebih luas perdagangan terjadi di antara Negara-negara di dunia. Perdagangan suatu Negara diartikan sebagai total perdagangan yang terjadi di antara para *trader* yang berasal setidaknya dari 2 Negara. Sejak abad 17 hingga akhir abad 18 praktek dagang di dunia didominasi oleh cara perdagangan *ala* liberal dengan Inggris sebagai hegemon. Dengan mereduksi peran Negara dalam aktivitas ekonomi para pemikir liberal seperti Adam Smith dan David Ricardo meyakini kemakmuran umat manusia di seluruh dunia akan tercapai.

Setelah memasuki abad ke 19 atau tepatnya menjelang perang dunia I hingga perang dunia II, praktek perdagangan berbalik menjadi sangat merkantilis. Dalam seting perang, Negara-negara menjadi sangat proteksionis. Aneka kebijakan yang diambil diarahkan untuk melindungi eksistensi para pelaku ekonomi domestik sembari bersikap antipasti terhadap pemain ekonomi asing. Kebijakan ini berlangsung hingga perang dunia II berakhir. Paska perang, Amerika dan Soviet muncul sebagai dua hegemon yang bersaing ketat.

¹ Bab ini merupakan bagian dari artikel penulis dengan judul *fair trade sebagai model perdagangan alternatif: tantangan dan strategi* yang dimuat dalam Jurnal Spektrum Vol. 9, No. 1, Januari 2012.

Untuk meningkatkan posisinya dalam berhadapan dengan Soviet yang komunis, Amerika berupaya mendorong liberalisasi perdagangan dunia yang secara operasional dilakukan dengan mendirikan *International Trade Organizations* (ITO), namun karena kongres di Amerika tidak sepenuhnya menyetujui, maka ITO kandas. Kendati demikian bukan berarti upaya liberalisasi dihentikan. *General Agreement Tariff and Trade* (GATT) yang sejak awal dimaksudkan sebagai penopang ITO tetap dipertahankan oleh Franklin D. Roosevelt, presiden terpilih AS pada 1932.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penopang perdagangan bebas, GATT hingga dekade 1990 an telah melakukan sedikitnya 8 putaran perundingan. Di antaranya: putaran Jenewa (1947-9); putaran Annecy (1949-50); putaran Torquay (1950-6); putaran Jenewa (1956-60), dalam empat putaran pertama tersebut sedikitnya 23 negara terlibat; kemudian diteruskan dengan putaran Dillon (1960-1) yang melibatkan 45 negara termasuk di dalamnya Negara-negara sedang berkembang; putaran Kennedy (1961-7); putaran Tokyo (1973-9) yang melibatkan 99 negara; sementara pada putaran Uruguay (1986-94) setidaknya 125 negara terlibat.

Bila melihat keanggotaan dalam putaran 1-8 maka terlihat betapa model perdagangan *ala* liberal ini dipraktikkan banyak Negara. Pada perkembangannya, karena dianggap kurang efisien GATT diubah menjadi *World Trade Organization* (WTO) dengan berbagai modifikasi tambahannya. WTO bersama International Monetary Fund (IMF) dan World Bank menjadi penyangga utama perdagangan bebas.

Sulit disangkal, praktik perdagangan berbasis prinsip liberal kendati mampu menciptakan

pertumbuhan, namun secara bersamaan menghasilkan kesenjangan ekonomi yang semakin dalam, baik di antara para pelaku ekonomi di dalam suatu Negara maupun antar Negara.

Korporasi-korporasi besar dengan modal yang besar dan aneka teknologi canggihnya telah mampu menghasilkan berbagai produk yang tidak hanya berkualitas namun juga murah, di sisi lain terdapat pula para pelaku ekonomi dengan modal dan teknologi yang terbatas yang terpaksa harus menyingkir dari arena kompetisi. Pola persaingan seperti ini mengantarkan pada situasi di mana kendati pertumbuhan ekonomi terus melaju namun semakin terkonsentrasi pada sedikit orang sembari menyisahkan bagian besar masyarakat yang lain dalam keadaan miskin.

Tak ayal pola hubungan di antara para pemilik modal dan buruh di banyak Negara berkarakter eksploitatif. Buruh kontrak dengan upah kecil, buruh anak, buruh perempuan tanpa cuti haid serta berbagai masalah lain terkait hubungan buruh perusahaan menjadi masalah yang di satu sisi menguntungkan perusahaan namun merugikan buruh di sisi yang lain. Belum lagi hubungan simbiosis mutualisme pemerintah-pengusaha yang seringkali menciderai kepentingan buruh. Dalam banyak kasus pelanggaran HAM dilakukan pihak perusahaan terhadap buruh.

Dalam dimensi lingkungan, aktivitas perusahaan seringkali destruktif. Aneka limbah industri yang dibuang ke sungai, maupun polusi udara hingga penggundulan hutan dan penghancuran gunung-gunung menggunakan dinamit oleh perusahaan-perusahaan tambang benar-benar sampai pada tahap pengerusakan yang tidak dapat diramalkan. Ekosistem terganggu, penduduk lokal yang

menggantungkan hidupnya pada alam harus menanggung akibat ulah perusahaan-perusahaan besar yang tidak bertanggung jawab. Singkatnya, rezim perdagangan bebas berkorelasi positif dengan semakin meluasnya kemiskinan, aneka pelanggaran HAM maupun berbagai jenis degradasi lingkungan.

BAB 2

FAIR TRADE: MAKNA, LATAR BELAKANG, TANTANGANNYA DAN STRATEGI

Rezim perdagangan dunia yang mewujud dalam eksistensi WTO, IMF, World Bank dan aneka regulasi yang mereka produksi dengan sangat tegas mendisain perdagangan bebas (*free trade*) dunia. Para pendukung *free trade* meyakini bahwa mekanisme perekonomian tersebut berpotensi menciptakan kesejahteraan global, melalui apa yang disebut Adam Smith sebagai *invisible hand*.

Namun demikian sulit disangkal bahwa praktek *free trade* menyisahkan banyak cerita memilukan. Kesenjangan perekonomian global dan eksploitasi, kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan multi nasional sebagai salah satu pilar penting *free trade*, pelanggaran hak buruh dan konsumen, aneka permasalahan *gender* serta berbagai masalah lainnya seringkali bermuara pada praktek perdagangan yang mengabaikan nilai-nilai keadilan. Dari konteks inilah maka muncul gerakan alternatif perdagangan global, yang lazim kita dengar dengan istilah: *fair trade* atau perdagangan adil.

A. Makna *fair trade*

Organisasi *fair trade* yang berbasis di Inggris, Oxfam, mendefinisikan *fair trade* sebagai suatu gerakan internasional yang mencoba memberikan jaminan bahwa produsen di negara-negara miskin mendapat kontrak-kontrak yang adil (*fair deal*) yang mencakup harga yang pantas bagi produk-produk mereka, kontrak-kontrak pembelian jangka panjang, dukungan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, serta peningkatan produktifitas (Hadiwinata, B. S. 2004: 6).

Sementara itu organisasi *fair trade* di seluruh dunia menyepakati definisi *fair trade*:

"... sebuah kemitraan dagang berdasarkan dialog, transparansi dan saling menghormati untuk mencari keadilan yang lebih luas dalam perdagangan internasional. Membantu pengembangan berkelanjutan dengan menawarkan persyaratan perdagangan yang lebih baik, menyelamatkan hak-hak produsen dan pekerja yang terpinggirkan (tidak diuntungkan) khususnya di negara selatan". (APIKRI. No 1/ tahun. I, hal 2).

Sedikitnya terdapat 10 konsensus standar *fair trade* yang diterapkan oleh para pelaku ekonomi berbasis keadilan ini, yaitu: (1) membuka kesempatan kerja; (2) transparansi dan pertanggungjawaban; (3) peningkatan kapasitas (pembelajaran); (4) promosi *fair trade*, (5) upah layak; (6) keadilan *gender*; (7) kondisi kerja yang aman dan sehat bagi pekerja; (8) tidak mempekerjakan anak (atau membolehkan namun menjaga hak-haknya, seperti kesehatan, keamanan, pendidikan dan bermain); (9) ramah lingkungan; dan (10) peduli terhadap relasi dagang (terutama produsen kecil, dengan misalnya untuk menjamin kelangsungan usaha, produsen patut menerima uang muka setidaknya 50%), (APIKRI. No 1/ tahun. I, hal 2).

Konsep *fair trade* pada perkembangannya lebih mengacu pada upaya-upaya untuk mengkaitkan aturan-aturan perdagangan dengan klausul-klausul sosial seperti *Universal Declaration of Human Rights*, serta berbagai konvensi internasional seperti *the Internasional Covenant on Civil and Political Rights*, *The Convention on The Elimination of all forms of Discrimination Against Women*, *the Internasional Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (Hadiwinata, B. S 2004: 5).

B. Latar belakang

Secara lebih spesifik setidaknya terdapat empat konteks yang mendorong munculnya gerakan *fair trade* (Hadiwinata, B. S. 2004: 4-5). *Pertama*, penyeragaman aturan perdagangan dengan menghapus aneka hambatan perdagangan yang telah mereduksi kemungkinan pelaku ekonomi melakukan perdagangan dalam konteks bilateral yang berbasis tawar menawar secara setara. Penyeragaman aturan yang dipromosikan para pendukung pasar bebas (WTO, IMF dan World Bank) alih-alih menciptakan *invisible hand* yang akan memproduksi kesejahteraan global sebagaimana yang dijanjikan Adam Smith justru sebaliknya menghasilkan ketimpangan ekstrem. Negara-negara di belahan bumi utara nampak lebih menikmati sistem ekonomi berbasis *free trade* ketimbang mereka yang berada di sebelah selatan.

Kedua, perdagangan bebas menciptakan kompetisi yang berimplikasi pada anarkisme ekonomi. Si kuat akan semakin kuat dan si lemah akan terus tertindas. Bingkai *free trade* dalam tingkat tertentu memproduksi sedikit pemain dengan konsentrasi modal yang besar di satu sisi dan banyak pelaku ekonomi lain yang tergerus karena kehabisan modal di sisi lainnya.

Ketiga, pembagian kerja internasional membuat negara-negara maju berkonsentrasi pada barang-barang padat modal dan teknologi yang memiliki *added value* tinggi sementara negara-negara *late comers*² berkuat pada

² Istilah *late comers* (para pendatang baru) dipilih untuk menghindari pemakaian istilah *developing countries* (*negara sedang berkembang*) atau negara dunia ketiga, yang memiliki kesan tidak bisa beralih ke dunia pertama dan artinya selalu terbelakang atau setidaknya selalu berada dibelakang dunia pertama. Ini berbeda dengan *late comers* yang berarti para pendatang baru, yakni negara-negara yang muncul pasca perang

barang-barang primer dan industri berteknologi rendah yang memiliki derajat *up grading* kecil.

Keempat, free trade tidak menjadikan *fairnes* (keadilan) sebagai hirauan utama sehingga aneka isu seperti Hak Asasi Manusia, gender dan lingkungan tidak pernah menjadi agenda. Isu-isu tersebut pada perkembangannya mendorong para aktivis yang peduli dengan keadilan untuk melakukan perubahan pada praktik perdagangan yang *unfair* itu.

Keempat karakteristik tersebut menjadi *starting point* yang mendorong gerakan *fair trade* di banyak negara, kendati dalam porsi yang masih sangat kecil. Transaksi *fair trade* di Eropa dan Amerika Serikat, misalnya, diestimasi hanya sekitar 400 juta USD atau 0,1% saja dari total transaksi perdagangan dunia (Zainal, N. 2007: 195).

Prinsip yang diusung *fair trade* bukanlah tanpa resiko. Banyak sekali konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi para pelaku ekonomi yang menempuh jalur ini. Beberapa di antaranya misalnya dalam hal bahan dasar produk yang mau dibuat harus didapatkan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Bila seorang pengrajin, misalnya, hendak menebang kayu sebagai bahan produknya, maka ia harus menanam pohon serupa dengan jumlah tertentu atau bila dimungkinkan pengrajin menggunakan limbah atau barang-barang yang tidak terpakai lagi.

Sementara dalam memperlakukan kariawan pengusaha yang menempuh jalan *fair trade* sangat memperhatikan keamanan dan hak-hak para pekerja.

dunia 2, karena boleh jadi, memang benar mereka lahir belakangan namun belum tentu nasib mereka tidak lebih baik dari *first comers* para pendatang awal yakni negara-negara Eropa.

Mereka tidak mempekerjakan anak-anak, memberi cuti bagi wanita yang mengalami kesulitan kerja karena haid atau melahirkan. Para pengusaha *fair trade* juga memperhatikan keamanan konsumen yakni kandungan bahan-bahan yang hendak digunakan untuk membuat produk harus aman bagi konsumen (Panzuri, A. 2011).

C. Strategi

Dengan mekanisme seperti itu maka biaya yang harus dipikul pengusaha *fair trade* sangat tinggi, yang artinya *margin* keuntungan mereka semakin tipis. Padahal pada waktu yang bersamaan mereka dihadapkan dengan para pesaing yang kebanyakan mengabaikan nilai-nilai tersebut. Untuk mensiasati hal ini, secara umum para pelaku *fair trade* melakukan dua strategi.

Pertama, memperpendek jalur distribusi. Para pengrajin, misalnya, menjual produk-produknya langsung kepada konsumen tanpa melalui distributor. Dengan demikian harga barang bagi konsumen tidak akan terlalu mahal; dan *kedua*, para pelaku *fair trade* mengkampanyekan nilai-nilai *fair trade* kepada calon konsumen. Konsumen yang sadar akan pentingnya *fair trade* tidak akan ragu membeli barang yang sedikit mahal demi *sustainable* lingkungan.

BAB 3

FAIR TRADE DALAM PETA PERDEBATAN PERSPEKTIF ARUS UTAMA EPI³

Di tengah dinamika perdagangan global, pola konflik dan eksploitasi sangat sulit dihindari. Inilah titik tolak bagi gagasan bernama *fair trade*. Secara khusus tulisan ini bermaksud mendudukan gagasan *fair trade*⁴ dalam peta perdebatan tentang perdagangan yang diajukan oleh perspektif arus utama dalam studi Ekonomi Politik Internasional (Merkantilisme, Liberalisme dan Strukturalisme).

A. Perspektif arus utama EPI

Tercatat dalam 2 dekade terakhir misalnya, nilai eksport perdagangan dunia naik hingga mencapai angka rata-rata di atas 8 persen (Akyuz, Y., 2003, 6). Oleh para analis pendukung pasar bebas fakta angka-angka itu dimaknai sebagai integrasi ekonomi dan interdependensi yang semakin menguat.

Sementara fakta lain yang berbeda, nampak betapa regionalisme muncul di sana-sini dan merkantilisme mengungkapkan diri dengan berbagai bentuknya. Sisi lain

³ Bab ini merupakan revisi artikel penulis berjudul *fair trade dalam peta perdebatan perspektif arus utama ekonomi politik internasional* yang dimuat dalam Jurnal Spektrum Vol. 8, No. 2, Juli 2011.

⁴Organisasi *fair trade* di seluruh dunia menyepakati definisi *fair trade*, sebagai sebuah kemitraan dagang berdasarkan dialog, transparansi dan saling menghormati untuk mencari keadilan yang lebih luas dalam perdagangan internasional. Membantu pengembangan berkelanjutan dengan menawarkan persyaratan perdagangan yang lebih baik, menyelamatkan hak-hak produsen dan pekerja yang terpinggirkan (tidak diuntungkan) khususnya di negara selatan (APIKRI No 1/ th. I).

dari fenomena ekonomi politik global ini di pahami sebagai kembalinya merkantilisme (*new mercantilism*). Fenomena tersebut menyuguhkan, betapa pertarungan antar perspektif tidak hanya berlangsung di dalam lingkaran pikiran semata, namun juga merambah dalam tataran praktis.

Dinamika perdagangan internasional diterjemahkan secara beragam oleh aneka perspektif berbasis ideologi yang tidak hanya mendominasi tafsir terhadap fakta perdagangan, namun lebih dari itu, menjadi acuan para pembuat kebijakan, baik yang berada di jajaran birokrasi negara, staf di perusahaan-perusahaan, para aktivis gerakan anti globalisasi hingga masyarakat sipil baik di tingkat domestik maupun global.

Gambar yang muncul dari cerita perdagangan internasional oleh seorang Merkantilis adalah pertarungan kepentingan ekonomi negara-negara yang terlibat dalam aktivitas dagang. Pola hubungan di antara para pemain utama ekonomi global itu, dipahami oleh ilmuwan Merkantilis sebagai *zero sum game*. Ketika suatu negara memacu produksi barang tertentu yang berimplikasi pada naiknya kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka di luar sana ada negara yang merugi akibat tambahan produksi itu, demikian sebaliknya. Pola inilah yang oleh para analis Liberal diyakini sebagai berkorelasi positif dengan konflik internasional. Kedua perang dunia yang bermuara di Eropa oleh para pemikir Liberal diyakini sebagai kelanjutan dari kebijakan Merkantilisme ekstrem.

Sebaliknya sebagai preskripsi, mereka para ilmuwan Liberal, justru membangun argumentasi secara terbalik dari kontruksi pikiran analis Merkantilis. Menurut mereka pasar yang tidak diintervensi negara akan menciptakan

hubungan tali temali di antara para pelaku ekonomi, yang implikasinya adalah semakin tereduksinya potensi konflik. Untuk meyakinkan argumentasi tersebut, Meredith (2010) menulis:

"Berita yang menggembirakan adalah bahwa kesalingtergantungan ekonomi internasional yang sedang tumbuh ini adalah sedikit mirip dengan pencegahan nuklir: Negara-negara yang telah mencapai ikatan perdagangan dan finansial mempunyai kepentingan untuk terus memelihara hubungan ekonomi dari pada memicu lingkaran ledakan-ledakan finansial yang dapat dengan cepat meningkat keseluruh dunia." (Meredith, 2010, 218)

Selain terkikisnya kemungkinan konflik, lebih jauh, pemikir Liberal meyakini pola hubungan antar bangsa yang berbasis pasar bebas bersifat *positive sum game*, dimana keuntungan yang didapat suatu negara tidak berarti kerugian bagi negara lain.

Di sisi lain, kaum Strukturalis/ Radikal justru memiliki narasi yang sangat berbeda terhadap fakta perdagangan yang berbasis ide pasar bebas. Mereka, para ilmuwan Strukturalis, memiliki banyak sekali bukti-bukti empiris betapa fakta perdagangan internasional berpola eksploitatif. Berbagai riset yang mereka lakukan menginformasikan pada kita betapa negara-negara yang berada di belahan bumi bagian utara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding negara-negara di bagian selatan.

Demikian cerita tentang perdagangan yang dinarasikan oleh tiga golongan ilmuwan yang berada dalam tiga arus utama studi EPI. Kendati dalam ketiga cara memahami fenomena perdagangan internasional tersebut terdapat kebenaran-kebenaran yang tidak dapat disangkal, namun sulit rasanya menutup mata dari aneka

keterbatasan yang juga terkandung dalam ketiga analisis pikiran utama dalam studi EPI. Sulit dipungkiri betapapun Merkantilisme sangat rasional dan mantap dengan berbagai anjurannya untuk mendapat keuntungan melalui kebijakan proteksi, namun sulit mengandaikan tatanan dunia damai dengan pola perdagangan *zero sum game* tersebut.

Demikian pula betapapun Liberalisme dengan rekomendasi pasar bebasnya harus diakui berprestasi dalam mengakumulasi kekayaan dan kemakmuran, namun sulit dipungkiri dari "rahim" kapitalisme lahir kesenjangan yang semakin lebar baik di tingkat domestik maupun internasional. Hal serupa juga terjadi dalam logika Strukturalis, betapapun para pemikir ini sangat pandai dalam memetakan permasalahan eksploitasi dan ketimpangan, namun anjurannya untuk revolusi sistem menjadi sangat utopis dan nyaris tidak dapat dilakukan.

B. *Fair Trade* dalam perdebatan perspektif arus utama

Di tengah konstalasi pemikiran dan fakta perdagangan internasional itu, mencul sekelompok ilmuwan kreatif yang memiliki perspektif optimis terhadap fakta perdagangan yang mereka sendiri akui sekarang berpola konfliktual dan eksploitatif namun dengan sedikit polesan di sana sini dapat disulap menjadi perdagangan yang *fair*. Mereka yang berada dalam barisan pemikir reformis ini diantaranya adalah ul Haq (1976), Raul Prebisch (1971) dan Johan Galtung (1971)⁵.

⁵Pandangan kaum reformis yang ditulis dalam bagian ini disadur dari tulisan Muhtar Maso'ed (2003, 55-65), dalam tulisan tersebut beliau menempatkan ul Haq (1976), Prebisch (1971) dan Galtung (1971) ke dalam kategori para pemikir berhaluan reformis. Hal: 60.

Serangkain asumsi dasar yang mendasari para pemikir Reformis ini diantaranya adalah *pertama*, mereka mengakui eksistensi peran negara dan aktor-aktor privat baik aneka kelompok kepentingan maupun para pelaku ekonomi swasta (Mas'ood, M., 2008, 34). Pola hubungan di antara mereka sangat kreatif tidak ada yang paling menentukan namun secara bersamaan berjaln berkelindan dan saling mempengaruhi dalam memproduksi iklim perdagangan. Anggapan ini sangat bertolak belakang dengan keyakinan tiga perspektif arus utama seperti yang diuraikan sebelumnya. Merkantilisme meyakini dominasi peran negara⁶, liberalisme sebaliknya mengakui eksistensi kuat para pelaku ekonomi privat sementara strukturalisme mempercayai kekuatan kelas sosial.

Kedua, para Reformis meyakini sekaligus menganjurkan bahwa tujuan kegiatan ekonomi politik (termasuk di dalamnya perdagangan) sejatinya merupakan maksimalisasi kesejahteraan global (Mas'ood, M., 2008, 34), ini berbeda dengan 3 perspektif arus utama EPI. Merkantilis mempercayai dan mengarahkan tujuan perdagangan internasional adalah surplus, sementara Strukturalis menganggap kesejahteraan kelas. *Ketiga*, Reformis, kendati mengakui bahwa perdagangan internasional bersifat konfliktual (seperti keyakinan Merkantilis) dan merugikan si lemah (seperti anggapan Strukturalis), namun mereka berkeyakinan itu bisa diperbaiki (Mas'ood, M., 2008, 34).

Sementara, *keempat*, peran negara, menurut kaum Reformis, bersifat primer dalam memperjuangkan

⁶lebih jauh para pemikir merkantilis meyakini pertumbuhan ekonomi akan terjadi ketika terdapat stabilitas politik yang mantap yang akan terwujud hanya dengan intervensi negara (Yustika, A., 2009, 173).

kelompok negara-negara lemah dalam forum-forum internasional (Mas'ood, M., 2008, 35). Pandangan ini mirip dengan argumentasi Merkantilis dan Strukturalis, hanya saja bedanya Merkantilis beranggapan peran pokok negara ditujukan untuk membela kepentingan ekonomi nasionalnya, sementara Strukturalis, meyakini peran kunci negara justru sebagai pejamin dan pelindung kepentingan kelas borjuis, namun lain dengan pandangan Liberal yang meyakini negara berperan sekunder, hanya menjamin keberlangsungan pasar bebas.

Kelima, dalam konteks memahami hubungan negara dan pasar para pemikir Reformis meyakini keduanya bersifat saling mempengaruhi (Mas'ood, M., 2008, 34), ini sangat berbeda dengan keyakinan ketiga cara pandang dominan. Kaum Strukturalis beranggapan pasarlah yang menentukan negara, karena negara sejatinya instrumen bagi kelas borjuis sebagai pelaku dalam perdagangan. Aneka kebijakan negara sejatinya dituntun, diarahkan dan diabdikan untuk kepentingan kelas borjuasi. Pemikir Merkantilis sebaliknya, justru mempercayai negaralah yang menentukan pasar⁷. Negara betapapun eksis bersama aktor-aktor lain non negara yang semakin menjamur namun porsinya dalam menentukan arah pasar tidak berkurang dengan semakin banyaknya para pelaku privat, karena negaralah satu-satunya aktor yang memiliki kewenangan legal untuk menggunakan kekuasaan. Sementara Liberalisme beranggapan pasar seharusnya yang menentukan negara. Argumentasi para penganut Liberalisme berangkat dari landasan filosofi bahwa negara dibuat sejatinya untuk menjamin kebebasan individu,

⁷Seorang merkantilis terkemuka Robert Gilpin dan Jean Millis menulis: politik internasional dan hubungan-hubungan politik secara signifikan mempengaruhi bentuk alami dan dinamika ekonomi internasional (Gilpin, R. , 2000, 391).

sehingga aktivitas pasar (yang dimainkan dan di ramaikan aktor-aktor privat) lebih berhak mengontrol negara dari pada sebaliknya.

Keenam, terhadap kemungkinan perubahan, para Reformis percaya perubahan bisa dituntun dan diarahkan secara berlahan dan bertahap ke reformasi struktur secara damai (Mas'ood, M., 2008, 34). Sementara kaum Strukturalis meyakini perubahan berpola disekuilibrium, sebaliknya pandangan Liberal justru berkeyakinan perubahan menuju ke arah ekuilibrium dinamik, sementara Merkantilis beranggapan perubahan bergantung pada konstalasi dan distribusi power (Mas'ood, M., 2008, 34).

Ketujuh, kaum Reformis menganjurkan untuk memanfaatkan organisasi internasional untuk strategi "*collective self reliance*" dan "*collective bargaining*" (Mas'ood, M., 2008, 36). Di sisi lain Merkantilisme mewajibkan negara untuk mengintervensi pasar demi menguatkan ekonomi nasional, pemikir Liberalisme mengajari kita agar memanfaatkan organisasi internasional namun membebaskan pasar dari intervensi. Sementara para pemikir dalam jajaran Strukturalis mendoktrinkan semangat keluar dari sistem kapitalisme internasional dan menerapkan strategi *autarky*.

C. Refleksi

Sebagaimana *free trade*, *fair trade* sejatinya hanyalah model, karena keduanya model maka mustahil menemukannya beroperasi secara utuh dalam ranah empiris. Hemat penulis ide *fair trade* sejatinya lahir dari pikiran para pemikir Reformis yang jika diruntut ke atas akan sampai pada Konstruktivisme dan akhirnya Posmodernisme. Mereka para pemikir Konstruktivisme

menganjurkan agar para pelaku hubungan internasional memperluas pemahaman cara-cara aktor internasional membangun gambaran-gambaran tentang hubungan internasional untuk menjelaskan keterbatasan dari berbagai interpretasi teoritis serta kebijakan yang diusungnya (Jemadu, A., 2008, 17) termasuk mengkritisi perspektif *mainstream* yang telah mapan dalam EPI.

Kritik para ilmuwan Rasionalisme terhadap bermacam buah pikir Posmo adalah utopisme ekstrem yang nyaris tidak dapat terjadi dalam ranah empiris. Ini adalah tantangan bagi parapemikir Reformis studi EPI. Pasar sebagai tempat bertemunya para pelaku ekonomi (produsen, konsumen dan distributor) sejatinya tidak bekerja sama persis seperti asumsi-asumsi para ilmuwan Liberal, Struktural maupun Merkantilis. Muhtar Mas'ood (1990, 94) dengan *apik* menulis:

Tidak ada analisis serius yang mengharapkan bahwa hubungan ekonomi dan politik global yang serumit perdagangan itu akan bisa diselesaikan dengan cara yang sepenuhnya konsisten dengan satu aliran pemikiran saja, terutama dalam suatu zaman dimana bahkan negara yang paling kuat di duniapun semakin tidak mampu memobilisasikan dukungan domestik dan internasional terhadap aliran pemikiran yang sejak lama di anjur-anjurkannya.

Justru karena itulah maka menurut penulis gagasan *fair trade* memiliki potensi yang besar sebagai panduan yang akan menuntun perdagangan global ke arah yang lebih beradab. Secara teknis ide *fair trade* dapat diterjemahkan dalam banyak cara. Aktor-aktor seperti kelompok epistemik, media massa, NGO-NGO yang bergerak dalam bidang HAM dan demokrasi nampaknya memiliki ruang yang luas untuk menerapkan gagasan ini. Seiring dengan itu masyarakat sipil mejadi basis utama yang harus dipersiapkan untuk memagari pikiran *fair trade* agar terus

terjaga dan dapat menjadi praktik yang mempola dalam kehidupan umat manusia.

BAB 4

PERJUANGAN *FAIR TRADE*: KASUS APIKRI YOGYAKARTA⁸

Cerita tentang APIKRI sejatinya dimulai sejak tahun 1987. Didampingi para aktivis *Oxfam Great Britain* (Oxfam GB), 25 orang pengrajin dengan ide revolusionernya berniat melakukan serangkaian perubahan yang sangat mendasar pada sistem ekonomi arus utama yang mengandung unsur-unsur ketidakadilan (*unfairness*). Hingga akhirnya di tahun 1990 lahirlah Asosiasi Pemasaran Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI).

Pada perkembangannya, kepanjangan APIKRI berubah menjadi: Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia. Kata "pemasaran" diganti dengan "pengembangan" karena permasalahan usaha mikro tidak hanya pemasaran saja, namun lebih luas dan kompleks dari itu. Masih di tahun yang sama nama APIKRI berubah lagi menjadi Yayasan Pengembangan Kerajinan Rakyat Indonesia yang disebut disebut Yayasan APIKRI. Nama tersebut tidak berubah lagi hingga manuskrip ini dibuat.

Bertempat di jalan Imogiri Barat KM 4,5 nomor 163 Yogyakarta, Yayasan APIKRI telah menerapkan prinsip-prinsip *fair trade*. Berangkat dari keperhatian sekelompok aktivisnya terhadap praktik ekonomi pasar bebas yang tidak berpihak pada sebagian besar para pelaku ekonomi kecil, sarat dengan ketimpangan gender,

⁸ Bab ini merupakan bagian dari artikel penulis berjudul *perjuangan menuju fair trade: pengalaman apikri dalam memediasi pengrajin lokal dan d' best furniture dalam mensiasati eco-labeling* yang dimuat di dalam Jurnal Spektrum Vol. 9, No. 2, Juli 2012.

perlakuan yang tidak ramah terhadap tenaga kerja dan lingkungan, Yayasan APIKRI bertekad untuk menjadi mediator dan fasilitator bagi mereka yang terpinggirkan agar tetap dapat eksis.

A. Visi dan misi

Visi APIKRI adalah menjadi lembaga yang menyuarakan gerakan *fair trade* untuk menguatkan masyarakat pengrajin mikro kecil di Indonesia (APIKRI. No 1/ tahun. I). Visi tersebut selanjutnya diterjemahkan secara lebih spesifik ke dalam sedikitnya 4 *point* misi, yaitu: (1) meningkatkan kemampuan bisnis bagi para pengrajin kecil; (2) memfasilitasi akses pemasaran bagi para pengrajin kecil; (3) memperkuat para pengrajin kecil sebagai pelaku usaha dalam dinamika ekonomi nasional; dan (4) mendorong terwujudnya perdagangan yang adil sebagai *instrument* untuk mencapai demokrasi dalam kehidupan ekonomi (APIKRI. No 1/ tahun. I).

B. Peran APIKRI

Visi dan misi tersebut mendorong APIKRI untuk memainkan sejumlah peran, yaitu: pembina, fasilitator, promotor, distributor, mediator dan kreator (APIKRI. No 1/ tahun).

1. Pembina

Untuk meningkatkan kemampuan bisnis bagi para pengrajin kecil, maka APIKRI tidak bisa tidak harus membina mereka. Permasalahan yang dialami pengrajin kecil secara umum selain modal adalah lemahnya *skill entrepreneurship*. Di sinilah letak relevansi peran APIKRI dalam pembinaan. APIKRI sering melakukan aneka pelatihan wirausaha. Tujuannya agar pengusaha kecil

memiliki kemandirian dalam menjalankan usahanya. APIKRI dengan berbagai programnya tentu tidak bermaksud membuat ketergantungan para pengrajin kecil tapi bermaksud menolong mereka agar menjadi pengrajin yang *independent* dan memiliki paradigma *fair trade* yang kuat.

2. *Fasilitator*

Masalah lain yang diderita para pengrajin kecil adalah masalah teknis bagaimana mereka menjual barangnya kepada *buyers*. Pengusaha-pengusaha besar akan dengan mudah menjual aneka produk mereka karena selain jaringan yang sudah mapan, modal mereka yang besar juga dapat membuat barang-barang dijual dengan harga bersaing. Di sisi yang berlawanan mereka yang bermodal *cekak* terpaksa harus menjual barang dengan harga relatif mahal. Dengan pola seperti ini maka tidak heran para pengrajin kecil banyak yang gulung tikar. Dalam konteks ini maka APIKRI memfasilitasi pengrajin kecil dengan membuatkan atau mengikutkan mereka ke dalam *showroom* di luar negeri. APIKRI misalnya memiliki TPB (Tempat Pemasaran Bersama), namun sekarang nama tersebut telah berubah menjadi Yayasan kegiatan fasilitasi marketing untuk usaha mikro.

Bila dalam pameran ada produk tertentu yang dipesan oleh *buyers* maka dengan segera Yayasan APIKRI akan menginformasikannya kepada pengrajin pemilik *sample* tersebut dan si pemilik *sample* lah yang berhak atas *order* atau pesanan itu. Bila *ordemya* banyak sehingga pengrajin tidak mampu menggarapnya sendiri, maka pengrajin bisa membagi *order* dengan pengrajin lainnya. Untuk biaya operasional, APIKRI mendapatkan bagian dari order pengrajin, tentu dengan jumlah yang

tidak memberatkan mereka dan melalui proses persetujuan pengrajin.

3. *Promotor*

Tidak hanya mempromosikan karya-karya pengrajin, namun juga (dan justru ini yang terpenting) APIKRI secara konsisten mempromosikan nilai-nilai *fair trade* baik kepada calon *buyers* maupun produsen besar maupun kecil. Promosi *fair trade* membuka peluang terbukanya pasar bagi para pengrajin kecil berbasis *fair trade*. Kendati bukan pekerjaan mudah namun *buyers* yang sudah tercerahkan kebanyakan akan konsisten, sehingga walaupun pasarnya sulit berkembang namun pasar yang sudah terbuka memiliki jangka waktu yang panjang.

4. *Distributor*

APIKRI juga secara terus-menerus berupaya membantu mendistribusikan produk-produk pengrajin kecil. Dengan jaringan yang lemah para pengrajin kecil kerap kali mengalami kesulitan untuk mendistribusikan produk-produknya. Dalam konteks inilah peran distribusi APIKRI sangat penting. Peran distributor APIKRI sangat terbantu oleh mitra-mitra Apikri di luar negeri, sebut saja misalnya: Oxfam GB, Uxfam USA, MCC Canada, MCC USA, CAA Australia, FTO Belanda, SERRV USA, Alternative Handle di Swedia, Shared Earth, GEPA Germany, Zenobla-Jepang dan Pekerti di Jakarta (Hadiwinata, B. S. 2004: 165).

5. *Mediator*

Ini dilakukan APIKRI untuk memediasi para pengrajin kecil dengan *buyers* terutama di luar negeri.

Tanpa keterlibatan APIKRI para pengrajin kecil tidak dapat menemukan *buyers* asing. Peran mediator APIKRI memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menggerakkan perekonomian skala mikro di daerah-daerah di Indonesia.

6. Kreator

Jurus paling ampuh yang menjadi andalan APIKRI yaitu kreativitas dalam segala hal baik desain, metode produksi maupun pemasaran. Bahkan APIKRI memiliki tim *desainer* yang siap membantu para pengrajin dalam aneka permasalahan terkait desain. Pengrajin yang datang kepada APIKRI dengan desainnya sendiri, kali pertama akan diteliti desainnya untuk memastikan desain itu unik belum ada sebelumnya dan asli karya pengrajin sendiri. Setelah melewati tahap tersebut desain akan dibuatkan sampel produk, dan barulah sampel dipromosikan untuk mendapatkan pesanan (Panzuri, A. 2011).

Dengan serangkaian peran tersebut APIKRI mengorganisir diri dan berelasi dengan berbagai mitra. *Trend* pertumbuhan modal, produksi, jaringan dan pasar menjadi indikator paling kasat mata betapa APIKRI memainkan aneka peran tersebut secara efektif dan efisien. Salah satu hal menarik yang perlu dicatat dalam perjalanan Yayasan APIKRI yaitu, di awal berdirinya ia hanya memiliki modal sebesar Rp 180.000 yang mereka dapat dari hasil patungan anggota, namun yang mengejutkan modal tersebut pada tahun 2011 sudah berkembang menjadi Rp. 2.400.000.000 (Panzuri, A. 2011).

C. Jalan terjal berliku

Dalam perjalanannya menjadi organisasi pengusung gagasan *fair trade*, Yayasan APIKRI menghadapi banyak

tantangan. Berbagai tantangan muncul baik di tingkat pengrajin, operasionalisasi hingga pasar.

1. Di tingkat pengrajin

Tantangan pelik, bagi Yayasan APIKRI datang dari pengrajin. Pengrajin, sebagaimana para pebisnis, tak bisa dipungkiri juga mengejar keuntungan. Kesulitan akses pasar yang dihadapi pengrajin umumnya mendorong mereka untuk merapatkan diri pada APIKRI. Bagi APIKRI itu adalah peluang untuk mensosialisasikan nilai-nilai *fair trade* dan APIKRI juga, harus diakui, akan mendapatkan kontribusi dari keuntungan pengrajin untuk keperluan operasional.

Sayangnya, ketika pengrajin sedang mendapat banyak order mereka cenderung keluar dari jalur APIKRI, sebaliknya ketika mereka tidak mendapat order mereka akan segera kembali ke APIKRI (Panzuri, A. 2011). Menjual produk melalui APIKRI, menurut para pengrajin, hanya akan mempersulit diri, karena harus mengikuti serangkaian aturan yang kerap kali menyulitkan. Pewarna yang dipakai untuk aneka produk misalnya harus aman untuk konsumen. Bahan yang dipakai untuk karyanya harus ramah lingkungan dengan serangkaian aturan yang cukup *njlimet*. Belum lagi perlakuan terhadap para pekerja juga menjadi tolak ukur apakah layak atau tidak untuk mendapat predikat *fair trade*. Termasuk larangan untuk mempekerjakan anak-anak. Aturan-aturan tersebut seringkali menjadikan para pengrajin memilih untuk menjual barangnya sendiri dari pada melalui jaur APIKRI.

Pola tingkah laku para pengrajin kecil yang semacam ini kerap kali menyulitkan APIKRI. Order yang tiba-tiba datang, terkadang malah ditolak pengrajin karena alasan mereka sedang punya order sendiri yang

lebih menguntungkan (Panzuri, A. 2011). Kendati APIKRI kemudian mengalihkan pesanan tersebut ke pengrajin lain, namun pekerjaan itu bukanlah tanpa kesulitan, karena APIKRI harus memastikan, pengrajin yang dipilih memiliki kemampuan untuk membuat produk yang dipesan, bila tidak bisa berakibat fatal, karena mengecewakan konsumen.

2. *Level operasional*

Misi besar APIKRI bersama organisasi lain sejenis adalah membangun rezim *fair trade*, salah satu hambatan paling yang cukup berat ketika mengamati peran APIKRI dalam menyediakan jalur perdagangan alternatif yaitu kuantitas yang terbatas yang berimplikasi pada keterbatasan kemampuan untuk memfasilitasi para pengrajin kecil di seluruh nusantara. Sebuah rezim perdagangan yang menjadi *mainstreme* mensyaratkan tidak hanya konsep yang bersifat *problem solving* namun juga *agent* yang banyak dan kuat secara finansial dan jaringan. Dalam konteks ini maka APIKRI masih menjadi *agent* yang belum dikenal banyak masyarakat secara umum di Indonesia. Artinya dari segi jumlah APIKRI dan organisasi berbasis *fair trade* lainnya belum bisa menjadi jalur alternatif bagi sebagian besar pengrajin kecil di seluruh Indonesia. Singkatnya, keterbatasan kemampuan APIKRI dalam memfasilitasi para pengrajin di Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya mempersulit APIKRI untuk secara operasional menjalankan visinya.

3. *Di tingkat pasar*

Sebagai lembaga yang bergerak dalam *fair trade* aneka produk yang difasilitasinya tentu memiliki harga yang relatif lebih mahal. Hal ini wajar karena mekanisme

yang harus dilalui produk *fair trade*, sehingga tidak heran bila produk-produk *fair trade* mengalami kesulitan dalam mendapatkan konsumen. Bahkan APIKRI nyaris tidak memiliki pasar dalam negeri, karena tergerus oleh persaingannya dengan misalnya produk-produk Cina.

Tidak berhenti samapai di sini, tantangan terhadap APIKRI juga muncul dari moral *hazard* para pebisnis konvensional. Dalam hal ini, produk APIKRI yang berupa peti mayat yang terbuat dari anyaman pelapah pisang yang telah dikeringkan misalnya pernah dibajak oleh pelaku bisnis dalam negeri sendiri. Untungnya *buyers* yang berada di luar negeri telah melaporkan kepada APIKRI, sehingga APIKRI menegurnya dan mereka mau meminta maaf kepada APIKRI serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi (Panzuri, A. 2011).

BAB 5

PERJUANGAN FAIR TRADE: KASUS D' BEST FURNITURE MENSIASATI REZIM *ECO-LABELING*

Bila APIKRI menjadi contoh usaha *fair trade* yang sukses, maka D'Best Furniture merupakan permisalan pelaku ekonomi yang masih dalam tahap "belajar" *fair trade*. Terkadang—kendati tidak sepenuhnya—prinsip *fair trade* telah dilakukan oleh suatu perusahaan. D'Best Furniture barangkali salah satu perusahaan yang dapat ditunjuk dalam hal ini atau setidaknya ia berupaya keras untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan dengan menggunakan kayu-kayu daur ulang (*recycled wood furniture*) untuk membuat aneka produk-produk kreatifnya.

Berikut akan diketengahkan sedikitnya 2 hal yang penulis anggap relevan untuk membahas kisah perjuangan D'Best Furniture. ***Pertama***, perjalanan direktur D'Best Furniture, Wiratno, sebagai pengusaha *furniture*; dan ***kedua***, cara kreatif Wiratno menghadapi rezim *ecolabeling*.

A. Perjalanan Wiratno

Perjalanan panjang Ir. Wiratno, MBA (Direktur D'Best Furniture) dimulai dari Jepara, ketika pada tahun 1993 beliau menekuni karirnya dalam dunia *furniture* pada salah satu perusahaan di kota ukir itu. Dekade 90 an masih merasakan sisa-sisa masa emas *booming* kayu ukir Indonesia yang laku keras di pasar internasional pada tahun-tahun 70 dan 80 an. Jepara kala itu menikmati *comparative advantage* nya sebagai produsen kayu ukir.

Tak ayal, perusahaan tempat Wiratno bekerja pun mendapat berkah dari situasi tersebut.

Bagai mendapat *durian jatuh* Wiratno dijanjikan oleh atasannya, pemilik perusahaan akan mendapat $\frac{3}{4}$ dari total hasil penjualan produk atau sama dengan Rp 250 juta dalam waktu hanya satu tahun, angka yang begitu fantastis apalagi di tahun-tahun itu. Singkat cerita, Wiratno seperti disuntik energi semangat luar biasa dalam bekerja di perusahaan *sang bos*. Sayang seribu sayang janji tinggallah janji, *bos* yang ia *elu-elukan* tidak kunjung memberikan honor yang ditunggu-tunggu, kendati target kerja Wiratno sudah tercapai.

Sebagaimana cerita para pengusaha sukses lainnya, Wiratno memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan memilih membuat perusahaan serupa. Bersama dengan kakanda, Wiratno membangun bisnis *furniture*. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2003 dan kali ini bertempat di Bantul, Yogyakarta. Hanya berlangsung dua tahun sang kakak membuat perusahaan sendiri di tempat yang berbeda dan kini jadilah Wiratno seorang manajer tunggal yang *menahkodai* perusahaan. Perusahaan itu diberinya nama D'Best Furniture. Karena jenis usahanya yang tergolong unik, yakni dengan membuat aneka produk kreatif *furniture* dengan berbahan dasar limbah kayu maka Wiratno oleh media disebut-sebut sebagai pengusaha pengubah sampah menjadi *dollar*.

D'Best Furniture beralamat di Jalan Imogiri Barat Kilo Meter 9 Nomor 100 X. Tempat produksi barang-barang perabot rumah tangga ini didirikan di atas lahan dengan ukuran 30 kali 70 an meter persegi. Memiliki karyawan sebanyak 35 orang, namun bila ditambah dengan karyawan di 4 tempat kerajinan lain yang masih di bawah manajemen D'Best Furniture bisa mencapai 60 an

orang karyawan (Wiratno, 2011). Dengan berbagai sumber daya serta kreativitas yang dimilikinya D'Best Furniture mampu mengekspor barang-barangnya hingga ke Eropa dan Amerika.

B. Menghadapi rezim eco-labeling

Pasca perang dingin aneka isu baru bermunculan, apa yang dulu disebut sebagai *low politics* kini tidak kalah santernya dengan isu perang dan keamanan. Isu-isu seperti Hak Asasi Manusia, energi, ekonomi hingga lingkungan menjadi hirauan masyarakat internasional bersama isu keamanan. *Starting point* dimulai dari bergulirnya isu lingkungan. Para aktivis lingkungan *menyium bau tidak sedap* dalam bisnis ukir Jepara.

Para pelaku bisnis *furniture* di Jepara disebut-sebut sebagai melakukan praktik *illegal logging*. Peristiwa tersebut menjadi momentum penting bagi persebaran sentra-sentra *furniture* ke luar Jepara. Para pengusaha *furniture* memindahkan aktivitas produksinya ke terutama Solo, Sragen, Klaten dan Yogyakarta.

Yogyakarta menjadi salah satu sentra baru yang cukup menjanjikan. Wiratno pun mendapat *angin segar* dari perubahan peta bisnis *furniture* ini. Salah satu tantangan sulit bagi D'Best Furniture yang masih seumur jagung kala itu adalah kampanye anti *illegal logging* yang menuntut para pengusaha *furniture* untuk menggunakan kayu legal dalam membuat aneka produk mereka. Label *Forest Stewardship Council* (FSC) dan *Smart Wood* menjadi sangat elegan untuk produk *furniture* bagi konsumen terutama di Eropa dan Amerika. Padahal untuk mengurus *eco-labeling* sedikitnya membutuhkan biaya 75 juta dan 25 juta untuk setiap perpanjangannya (Wiratno, 2011).

Bagi perusahaan yang masih muda seperti D'Best Furniture, *eco-labeling* menjadi tantangan tersendiri yang sangat menyulitkan. Namun rupanya Wiratno tak kehabisan akal, untuk tetap eksis dalam bersaing melawan perusahaan-perusahaan yang sudah ber label ramah lingkungan seperti Karisma dan Capung Emas, D'Best Furniture menggunakan kayu bekas atau kayu daur ulang (*recycled wood furniture*). Kayu bekas tidak hanya murah harganya, namun juga tidak dapat dikategorikan sebagai *illegal logging*. Cara *nyentrik ala* Wiratno ini membuat D'Best Furniture tidak dapat dianggap *enteng* oleh para pesaingnya.

Dengan kreativitas, D'Best Furniture telah mampu bertahan dalam derasnya persaingan di pasar *furniture*. Satu hal menarik yang patut dicatat yaitu penggunaan kayu-kayu bekas yang didapat dengan membelinya dari para pemilik rumah-rumah yang sudah rusak. Bahkan yang tidak kalah menarik penambahan nilainya sangat tinggi satu truk kayu daur ulang yang dibeli hanya dengan harga Rp 500 ribu an, setelah diubah menjadi produk jadi per unitnya bisa mencapai Rp 2 juta.

BAB 6

BELAJAR DARI KASUS

APIKRI DAN D'BEST FURNITURE⁹

Baik APIKRI maupun D'Best Furniture merupakan dua pelaku *fair trade* yang menggunakan kreativitas sebagai basis usahanya. Sumber daya kreativitas masih tergolong langka bagi para pelaku ekonomi di tanah air, padahal bisnis kreativitas menjadi sumber yang tak pernah habis bagi *up grading* aneka produk usaha. Baik APIKRI maupun D'Best Furniture memiliki masalah yang secara umum boleh dikatakan sama, yakni pemasaran produk. Produk kedua pelaku *fair trade* ini nyaris tidak punya pasar di dalam negeri. Hal ini hemat penulis disebabkan karena konsumen di nusantara belum (bila enggan untuk mengatakan: tidak) memiliki paradigma *fair trade* yang kuat.

Aneka tantangan yang dihadapi para pegiat *fair trade* secara umum, khususnya APIKRI dan D'Best Furniture di Indonesia, hemat penulis, terletak pada belum membuminya gagasan perdagangan adil dalam masyarakat kita. Berbagai upaya memang telah dilakukan oleh para pelaku *fair trade* termasuk APIKRI. Dalam laporan riset berjudul *Perdagangan Adil Produk Pertanian Organik di Mitra Bumi Indonesia Malang* sebagaimana dikutip oleh Hadiwinata disebutkan bahwa sejumlah upaya yang dilakukan para pegiat *fair trade* untuk menanamkan nilai-nilai *fairnes* dalam masyarakat yaitu: penyebaran brosur, presentasi, pembuatan label,

⁹ Bab ini merupakan bagian dari artikel penulis berjudul *perjuangan menuju fair trade: pengalaman apikri dalam memediasi pengrajin lokal dan d' best furniture dalam mensiasati eco-labeling* yang dimuat di dalam Jurnal Spektrum Vol. 9, No. 2, Juli 2012.

pencetakan buletin dan pameran produk (Hadiwinata: 2004,147-49).

Hemat penulis, berbagai metode tersebut masih harus dikuatkan oleh upaya-upaya lain. Penulis menawarkan 4 metode tambahan. *Pertama*, sosialisasi *fair trade* dari level keluarga. Upaya ini bisa dimulai dari misalnya keluarga karyawan di sebuah perusahaan berbasis *fair trade*. Para karyawan hendaknya selalu diberi motivasi dan diminta kesediaannya untuk menanamkan nilai-nilai *fair trade* dalam keluarga mereka. Sebagai basis masyarakat, keluarga merupakan tempat terpenting untuk membentuk pandangan *fair trade* yang mapan dalam masyarakat.

Kedua, memasukan nilai-nilai *fair trade* ke dalam kurikulum sekolah. Merubah paradigma suatu bangsa juga bisa dimulai dari pendidikan. Bila sejak dini anak-anak kita diperkenalkan dengan kreativitas, nilai-nilai keadilan serta ramah terhadap sesama dan lingkungan tentu mereka kelak akan menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Pendidikan *fair trade* di sekolah idealnya tidak dibatasi pada transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) semata, di mana siswa hanya berkewajiban menghafal materi *fair trade* sebagai bekal ujian semata, namun juga harus dengan keteladanan sang guru melalui aneka kegiatan yang bersifat aksi.

Dan *ketiga*, gerakan *fair trade* juga harus menyentuh birokrasi pemerintah. Upaya ini tentu bukan perkara mudah, namun kesadaran pemerintah terhadap *fair trade* menjadi jalan kunci kesuksesan gerakan *fair trade*. Presentasi dan brosur sebagai metode promosi harus ditingkatkan dengan aneka program yang sifatnya melibatkan semua jajaran birokrasi di pemerintahan. Kebijakan yang berbasis keadilan harus dimulai dari

kesadaran tiap individu di birokrasi akan pentingnya nilai-nilai tersebut.

Ketiga strategi ini hemat penulis dapat menguatkan gerakan *fair trade* di Indonesia. Bila keluarga, sekolah dan pemerintah telah memiliki kesadaran terhadap *fair trade* maka akan tercipta masyarakat yang memiliki paradigma *fair trade* yang kokoh. Stagnasi gerakan *fair trade* terutama di Indonesia hemat penulis terletak pada lemahnya sosialisasi konsep *fair trade*. Penulis yakin *fair trade* berpotensi menjadi arus utama¹⁰ kendati harus melalui jalan panjang berliku dalam perekonomian Indonesia.

¹⁰ Untuk menjadi paradigma utama sedikitnya terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi: (Permadi, D., 2010: 87-105), yaitu (1) adanya momentum, dalam konteks ini maka kegagalan pasar bebas yang ditunjukkan dengan berbagai krisis yang terjadi menjadi momentum yang tepat; (2) ada *agent* intelektual yang mempromosikan, para akademisi di perguruan tinggi bisa memerankan peran ini; (3) adanya dukungan politik yang menopang, poin ini mungkin yang belum dimiliki *fair trade* di Indonesia dan (4) penerimaan oleh publik. Pada tahap ini masyarakat yang menjadi korban *free trade* berpotensi menerima konsep *fair trade*. Dari keempat hal tersebut yang belum dimiliki *fair trade* adalah basis kekuasaan. Promosi yang gencar di tingkat pemerintah dan dunia pendidikan hemat penulis menjadi strategi jitu untuk memenuhi syarat kekuasaan (*power*).

BAB 7

TRANSFORMASI *FREE TRADE* MENUJU *FAIR TRADE*, MUNGKINKAH?¹¹

Berbagai argumentasi dibangun guna membungkam fakta empirik kemiskinan yang terbukti telak merupakan produk dari pasar bebas (*free trade*)¹². Tidak hanya kemiskinan yang semakin menggila, wajah ekonomi berbasis liberal semakin “bopeng” dengan aneka penemuan kerusakan lingkungan di banyak pelosok dunia. Banjir, kekeringan, kelaparan hingga gempa dan tsunami yang muncul sebagai akibat dari hilangnya keseimbangan alam karena eksploitasi besar-besaran perusahaan-perusahaan raksasa multinasional menjadi bukti tak terbantah betapa sistem ekonomi pasar bebas sangat tidak ramah dan tidak adil (*unfair*). Anehnya para pendukung pasar bebas tak pernah bosan untuk menghentikan aktivitas liberalisasi pasar hingga tulisan ini dibuat.

Konteks inilah yang pada perkembangannya mendorong sejumlah aktivis menawarkan cara baru perdagangan: *fair trade* (perdagangan yang adil) sebagai alternatif. Karena bertentangan dengan prinsip ekonomi, praktik *fair trade* berkembang sangat lambat, orang lebih memilih praktik dagang konvensional ala pasar bebas ketimbang jalan alternatif yang bersahabat tersebut. Secara khusus tulisan ini bermaksud menjawab

¹¹ Naskah bab ini pernah dimuat dalam buku penulis berjudul: *Isu-isu perdagangan internasional: dari embargo, perdebatan open regionalism hingga transformasi fair trade* yang diterbitkan oleh Wahid Hasyim University Press pada tahun 2014.

¹² Lihat misalnya data yang dipublikasikan *Bill and Melinda Gates Foundations* (Bill and Melinda Gates Foundations: *Savings Statistics*).

pertanyaan: seberapa besar kemungkinan terjadi tranformasi dari *free* menuju *fair trade* dapat terjadi?

A. Transformasi paradigma

Konsep paradigma Thomas Khun dapat menjelaskan gerak pertumbuhan ide dan praktik *fair trade* yang lamban. Khun sejatinya menggunakan konsep paradigma untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Hemat penulis, perkembangan *fair trade* sebagai gagasan dan praktik seanalogue dengan dinamika ilmu pengetahuan sehingga dapat diterangkan pula dengan konsep serupa.

Menurut Khun, pengetahuan pertama kali dipelajari oleh para ilmuwan secara tidak terpolakan. Mereka mengumpulkan data dari berbagai tempat dengan aneka caranya masing-masing. Dalam perkembangannya ketika pengetahuan-pengetahuan yang dihasilkan dari riset-riset para ilmuwan tersebut dikomunikasikan satu sama lain, maka akan terjadi perdebatan terkait pengetahuan tersebut di antara para ilmuwan. Hingga sampai pada suatu tahap di mana mereka "menyepakati" serangkaian landasan-landasan yang dianggap benar. Melalui landasan-landasan ini selanjutnya riset-riset dikonstruksi. Kesepakatan inilah yang oleh Khun disebut paradigma.

Kesepakatan-kesepakatan seperti, bagaimana pengetahuan seharusnya dikonstruksi?, apa yang menjadi sasaran penelitian?, serangkaian langkah teknis apa yang harus dilalui dalam riset?, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam riset?, dan berbagai nilai tertentu yang diyakini harus menjadi unsur dalam proses pembentukan ilmu serta berbagai kesepakatan-kesepakatan lain, menjadi dasar bagi terbentuknya paradigma.

Paradigma dalam ilmu pengetahuan tidaklah berwajah tunggal, namun sangat majemuk, terjadi persaingan yang ketat di antara paradigma-paradigma tersebut. Dan terjadi pula upaya saling mendominasi. Paradigma yang memiliki banyak pengikut akan menjadi paradigma utama selama dapat mempertahankan dominasinya. Sementara paradigma yang memiliki sedikit pengikut bukan tidak mungkin akan hilang sama sekali ketika ditinggalkan para pengikutnya. Paradigma yang memiliki banyak pengikut, telah stabil dan relatif mapan oleh Khun dikategorikan disebut sebagai *normal science*. Pada perkembangannya paradigma yang mapan akan dihadapkan pada suatu peristiwa yang menantang kesahihannya, hingga pada akhirnya paradigma tersebut terbukti gagal dipertahankan keabsolutannya. Keadaan ini disebut *anomali*, yakni gagalnya paradigma dalam memberikan penyelesaian bagi masalah baru yang muncul.

Anomali selanjutnya membuka peluang bagi paradigma-paradigma lain untuk menampilkan diri. Dalam pertarungan antar paradigma tersebut, ada yang harus tersingkirkan hingga tersisah sedikit atau bahkan satu paradigma dominan. Satu hal yang penting adalah kemampuan suatu paradigma lebih ditentukan oleh *power* dari pada kesahihannya dalam menjawab persoalan. Boleh jadi suatu paradigma lebih sah dari yang lain namun karena basis kekuasaannya lemah maka tidak menjadi paradigma dominan. Sebaliknya boleh jadi ada paradigma yang sejatinya gagal merespon persoalan namun karena memiliki basis kekuasaan yang kuat maka ia menjadi paradigma yang mapan. Pandangan ini sejalan dengan alur pikiran para pemikir berhaluan kritis (Burchill, S., 2005, 137-159).

Dalam kerangka pemahaman seperti ini *fair trade* diletakan dalam konstalasi pertarungan antar paradigma perdagangan di mana *free trade* menjadi paradigma dominan dengan basis kekuasaan yang sangat kuat. Sementara di sisi yang berbeda *fair trade* merupakan paradigma pinggiran yang sedang diperjuangkan para penganutnya untuk menjadi paradigma utama.

B. Paradigma fair trade

Konteks ketimpangan ekonomi global bukan tanpa pengaruh terhadap aneka dimensi lainnya, inilah yang menjadi pemicu munculnya gagasan dan gerakan bernama *fair trade* pada tahun 1943 oleh para aktivisnya di Amerika Serikat dan Guatemala (Panzuri, A., 2011). Gerakan *fair trade* di Amerika didorong oleh *epistemic community*. Kepekaan yang tinggi terhadap praktik perdagangan yang tidak adil produk *free trade* yang terjadi di banyak negara di dunia mendorong mereka untuk menjadi agen propaganda *fair trade*. Sementara *women trafficking* telah menyulut gerakan berbasis keadilan di Guatemala dan menjadi salah satu tonggak penting bersejarah bagi perkembangan *fair trade* selanjutnya (Panzuri, A., 2011).

Di Belanda gerakan serupa dipicu oleh nasib buruh yang memilukan, sehingga memuncak pada munculnya gerakan partai buruh kala itu (Panzuri, A., 2011). Di negara-negara seperti India, Srilangka, Banglades, Pilipina hingga Indonesia pada dekade 70 an telah muncul pula gerakan serupa. Gerakan-gerakan tersebut tidaklah lahir secara parsial di masing-masing negara namun mereka menjalin hubungan dan mengorganisir diri di tingkat regional bahkan global.

Asia Fair Trade Forum (AFTF) misalnya, menjadi basis gerakan di tingkan regional. Sementara di tingkat nasional, di Indonesia, hingga setidaknya 2011 terdapat sedikitnya 20 an organisasi yang bergerak dalam arus *Fair Trade* yang tergabung dalam wadah besar *Forum Fair Trade Indonesia (FFTI)*.

C. Menuju paradigma fair trade

Dengan menggunakan model perkembangan ilmu Khun, dinamika perkembangan *fair trade* di antara kemajemukan paradigma perdagangan global yang didominasi secara telak oleh *free trade* dalam tulisan ini dipahami. Kendati gerakan *fair trade* sudah lama diperjuangkan, namun geliatnya sangat lemah. Di Indonesia saja misalnya walaupun sudah dimulai sejak tahun 70 an atau lebih dari 40 tahun yang lalu sejak tulisan ini dibuat namun hingga setidaknya tahun 2011 unit pelaku ekonomi resmi yang bergerak dalam *fair trade* hanya berjumlah 20 an yang tergabung dalam *Forum Fair Trade Indonesia*. Hal serupa juga terjadi pada gerakan *fair trade* di banyak negara lain. Kenapa gerakan *fair trade* sulit berkembang dan seberapa besar kemungkinan *fair trade* menjadi *mainstrame* dalam perdagangan global?

Dedy Permadi (2010, 101), merumuskan sedikitnya terdapat 4 faktor yang mendorong suatu ide menjadi ide utama, yaitu: (1) momentum; (2) aktor intelektual; (3) kekuatan politik dan (4) penerimaan masyarakat. Sementara saya terinspirasi oleh Dedy Permadi berpendapat bahwa faktor yang mendorong sebuah ide menjadi paradigma adalah: (1) Momentum, (2) *problem solving*, (3) agen propaganda; dan (4) basis kekuasaan. Dengan keempat faktor tersebut, menurut saya, *fair trade* akan melalui jalan panjang berliku.

1. *Jalan panjang berliku*

Ditinjau dari segi momentum, sejatinya telah terdapat banyak sekali momentum yang menunjukkan betapa *free trade* gagal dalam menyelesaikan aneka problematika ekonomi global. Contoh bagusnya adalah berbagai krisis global yang terjadi selama ini, seperti krisis finansial global 2008 yang dipicu oleh gagal bayar para nasabah perusahaan raksasa investasi properti, *Lehman Brothers*; krisis finansial di Asia 1997 yang dipicu oleh jatuhnya nilai *bath* di Thailand; serta berbagai krisis finansial lain serupa hingga depresi besar yang bersumber dari Amerika. Momentum yang menunjukkan kegagalan paradigma konservatif dominan sejatinya sudah cukup banyak, hanya saja kesempatan itu sering diabaikan oleh paradigma pinggiran untuk mengambil alih peran.

Kedua, dari sisi kemampuan memberikan solusi, maka *fair trade* terbukti cukup handal. *Fair trade* dalam banyak kasus memberikan solusi yang sangat konkrit dan aplikatif terhadap aneka permasalahan ketidakadilan yang muncul dari praktik pasar bebas. Permisalan paling mudah ditunjuk adalah praktik *fair trade* yang telah dilakukan oleh Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI) di Yogyakarta. APIKRI telah melakukan banyak aktifitas sebagai mediator bagi para pengrajin lokal dengan *buyers* di luar negeri, pekerjaan yang nyaris mustahil dilakukan sendiri karena kuatnya para pemaian besar. Secara intens APIKRI juga menerapkan standar *fair trade* terhadap pengrajin-pengrajin yang memanfaatkan jasanya. Dari mulai pemilihan bahan baku produk, proses produksi hingga pemasaran. APIKRI dengan ketat melakukan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip *fair trade*. Para pengrajin

pengguna jasa APIKRI misalnya, harus menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, mereka biasanya memilih limbah, kayu-kayu bekas, sampah yang berupa tempurung kelapa hingga daun-daun yang didapatkan dengan cara tidak merusak lingkungan. Dalam proses produksi, APIKRI juga memastikan agar karyawan diperlakukan secara manusiawi. Kesehatannya dan keselamatannya terjaga serta secara psikologi tidak tertekan. Dari sisi kemampuan memberikan solusi sejatinya *fair trade* tidak hanya aplikatif namun sudah terbukti.

Ketiga, memiliki agen propaganda, yaitu aktor, baik kelompok maupun individu, pemerintah maupun swasta, ilmuwan ataupun praktisi dengan aneka aktivitasnya untuk mempropagandakan nilai-nilai dan praktik *fair trade*. Agen-agen tersebut sejatinya sudah ada dalam gerakan *fair trade*, bahkan langkah-langkah mereka untuk mempromosikan ide dan praktik *fair trade* juga sudah dilakukan. Di antaranya yaitu: penyebaran brosur, presentasi, pembuatan label, pencetakan buletin hingga pameran produk (Mitra Bumi Indonesia, 2003 dalam Hadiwinata, S. B., 2004). Hanya saja satu hal yang perlu digaris bawahi, upaya tersebut masih tergolong lemah, bahkan sangat lemah. Indikator yang dapat ditunjuk misalnya yaitu jumlah para pelaku usaha berbasis *fair trade* yang tergolong masih sangat sedikit.

Keempat, memiliki basis kekuasaan. Basis kekuasaan diperankan oleh pemerintah. Melalui berbagai program yang didisainnya, pemerintah yang mendukung cara-cara *fair trade* sebagai paradigma perdagangan akan menggunakan *power* untuk mendorong *fair trade* menjadi praktik dagang. Dilihat dari sisi ini, maka nyaris kekuasaan absen dari gerakan *fair trade* terutama di

Indonesia. Lihat tabel 8. 1 Ringkasan Indikator Transformasi Paradigma.

Dari survai sederhana ini, dapat disimpulkan bahwa peluang transformasi dari *free trade* menuju *fair trade* sangat kecil. Basis kekuasaan menjadi masalah paling krusial yang dialami gerakan *fair trade*. Umumnya pemerintah kurang tertarik dengan metode perdagangan *fair trade*. Tidak hanya karena secara teknis sulit dilakukan, namun juga karena kecenderungan pemerintah berfikir instan.

2. Langkah paling mungkin

Ditinjau dari empat barometer tersebut, maka masalah mendasar *fair trade* ada dua, yaitu, terbatasnya agen propaganda dan lemahnya basis kekuasaan. Dua masalah tersebut seharusnya dijadikan penuntun bagi para pelaku *fair trade* dalam memperkuat paradigma perdagangan alternatif ini. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka hemat penulis serangkaian langkah praktis berikut dapat diterapkan, yaitu:

Pertama, menanamkan nilai-nilai *fair trade* ke dalam lokus terkecil masyarakat, yakni keluarga. Kariawan di sebuah perusahaan berbasis *fair trade*, misalnya, bisa diminta untuk dapat memulai praktik ini di tingkat keluarganya masing-masing. Sebagai basis masyarakat, keluarga merupakan tempat terpenting untuk membentuk pandangan *fair trade* yang mapan di dalam masyarakat. Hal-hal yang kerap dianggap sepele seperti memilah-milah sampah organik dan non organik, membuat kerajinan kreatif menggunakan barang-barang tidak terpakai, penghormatan terhadap sesama dan lingkungan menjadi nilai-nilai dasar yang seharusnya sedini mungkin ditanamkan di tingkat keluarga.

Kedua, memasukan *fair trade* ke dalam kurikulum sekolah. Tempat lain yang cukup strategis untuk memulai membangun paradigma *fair trade* yang kuat di dalam masyarakat adalah pendidikan. Bila sejak dini anak-anak dikenalkan dengan kreativitas dan keramahan terhadap lingkungan dan sesama tentu mereka kelak akan memiliki kecintaan dan kepedulian terhadap alam sekitar. Bila mereka diajari bagaimana memperlakukan secara adil dan bijak terhadap teman-teman mereka tanpa membedakan status *gender*, ekonomi, agama maupu etnis maka mereka akan menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi penghormatan kepada sesama manusia. Pendidikan *fair trade* di sekolah idealnya tidak membatasi diri hanya pada transfer pengetahuan, di mana siswa hanya berkewajiban menghafal materi *fair trade* sebagai bekal mengerjakan soal ujian semata, namun juga harus dengan keteladanan sang guru melalui aneka kegiatan yang bersifat psikomotorik.

Ketiga, gerakan *fair trade* juga harus menyentuh birokrasi pemerintah. Ini tentu bukan perkara mudah, namun kesadaran pemerintah terhadap *fair trade* menjadi jalan kunci kesuksesan gerakan *fair trade*. Presentasi dan brosur sebagai metode promosi harus ditingkatkan dengan aneka program yang sifatnya melibatkan semua jajaran birokrasi di pemerintahan. Kebijakan yang berbasis keadilan harus dimulai dari kesadaran tiap individu di dalam birokrasi pemerintah.

Keempat, harus diakui ada perusahaan yang telah mengamalkan ajaran *fair trade* namun tidak secara formal memakai label *fair trade* bahkan tidak pula masuk ke dalam keanggotaan organisasi *fair trade* tertentu. Orang-orang seperti ini tentu sangat kita hargai, namun keikutsertaan mereka dalam organisasi *fair trade* akan

memperkuat nilai tawar gerakan *fair trade*. *Point* ini harus mendapat perhatian khusus mengingat gerakan *fair trade* yang kuat akan memiliki kemampuan untuk menuntun dan mendorong kebijakan pemerintah. Saat hal tersebut dapat dilakukan maka jalan menuju *fair trade* akan terbuka. Basis kekuasaan bagaimanapun menjadi pondasi penting bagi gerakan *fair trade* di masa depan.

Keempat strategi ini hemat penulis dapat menguatkan gerakan *fair trade*. Bila keluarga, sekolah, pemerintah dan kelembagaan *fair trade* yang kuat telah bersinergi maka akan tercipta masyarakat yang memiliki paradigma *fair trade* yang kokoh. Stagnasi gerakan *fair trade* hemat penulis terletak pada lemahnya sosialisasi tidak hanya konsep namun yang lebih penting adalah praktik *fair trade*. Penulis yakin *fair trade* dengan sendirinya menjadi arus utama dalam perdagangan, bila basis kekuasaan dan agen-agen *fair trade* mengalami penguatan.

D. Penutup

Paradigma *fair trade* sebagaimana paradigma perdagangan yang lain, berjuang menjadi paradigma dominan. Kesulitan paling besar yang dihadapi *fair trade* dalam perjuangannya yang masih panjang menuju paradigma dominan perdagangan global, hemat penulis, diantaranya: *pertama* absennya basis kekuasaan yang berimplikasi pada *kedua* lemahnya propaganda penguatan *fair trade*. Bila inti masalahnya adalah dua hal tersebut, maka hemat penulis untuk mengokohkan paradigma perdagangan berbasis keadilan ini, langkah yang seharusnya dilakukan adalah memperkuat basis kekuasaan dan propaganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Akyuz, Yilmaz (ed). 2003. *Developing Countries and World trade: Performance and Prospects*. Malaysia: TWN.
- APIKRI, "Perniagaan Berkeadilan, sebuah gerakan global" *The Voice of Fair Trade*. No: 1/ tahun. I
- Burchill, Schoott, *at all* (2005). *Theories of International Relations* (third editions), New York: Pragave Macmillan.
- Gilpin, Robert dan Jean Millis Gilpin. [terj: Haris Munandar dan Dudy Priatna. 2000]. *Tantangan Kapitalisme Global Ekonomi Dunia Abad ke-21*. Jakarta: Muria Kencana.
- Hadiwinata, B. S., *Fair Trade: Gerakan Perdagangan Alternatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Oxfam dan Universitas Katlik Pahrayangan, 2004.
- Hazleton (Ed). 2005. *an Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations by Adam Smith* (Electronic Classics Series). Pennsylvania: the Pennsylvania State University.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- maketrade-fair.org: "*fair Trade and You*" dalam Hadiwinata, *Fair Trade: Gerakan Perdagangan Alternatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Oxfam dan Universitas Katlik Pahrayangan.
- Meredith, Robyn. 2010. *Menjadi Raksasa Dunia: fenomena kebangkitan India dan Cina yang luar biasa dan pengaruhnya terhadap kita*. Bandung: Nuansa.
- Maso'ed, Muhtar. 2003. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 1990. *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM.

_____. 1998. *Perdagangan dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional*(Bahan Kuliah). Yogyakarta: FISIPOL. UGM.

Paradigm - On Definition, Criticism Of Kuhn's Paradigms, Revolutions, Leaps Of Faith, Criticism Of Kuhn's Relativism. Diakses dari: <http://science.jrank.org/pages/7948/Paradigm.html> Senin 11 Juli 2011.

Permadi, D., "Pergeseran Neo Liberalism eke Neo Keynesianisme: mungkinkah?" *Multiversa*, Vol: 01, No: 01, Mei 2010, 87-105.

Perniagan Berkeadilan, sebuah gerakan global, Buletin APIKRI, No.1 /th. I The Voice of Fair Trade. Hal: 2.

Yustika, Ahmad Erni. 2009. *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisa Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zainal, N., "FAIR TRADE INDONESIA (Sustainability Equality And Humanity in Trade) Optimism Within Powerless?". *Jurnal Sosial Politik*. Vol: 14, No: 2, Desember 2007.

Wawancara:

Panzuri, Amir (Direktur APIKRI), Selasa, 14 Juni 2011, pukul 09.00-11.00 wib di kantor APIKRI, Jl. Imogiri Barat Km.4,5 No.163A.

Wiratno, Ir. MBA. (Direktur D'Best Furniture), Selasa 14 Juni 2011, pukul: 12.00—14.00, di D'Best Furniture, Jl. Imogiri Barat Km.9, No.100X.

TENTANG PENULIS



Sugiarto Pramono lahir di Tegal 2 Pebruari 1983, setelah menamatkan Madrasah Aliah Futuhiyyah 1 Mranggen Demak pada tahun 2001, Penulis melanjutkan studinya di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) dan selesai pada 2005. Kemudian melanjutkan studi S2 di FISIP UGM pada Jurusan yang sama di tahun 2010 dan lulus pada tahun 2012. Sekarang penulis aktif mengajar di FISIP UNWAHAS, aktif menulis buku-buku tentang Hubungan Internasional, dan menjadi tutor pada pendidikan politik pemula. Dapat dihubungi melalui hp: 087 861 287 670 atau email: sugiartop@gmail.com. Adapun tulisan yang telah dipublikasikan:

No	Judul	Media	Tahun
1	Pergeseran Politik Luar Negeri India terhadap Myanmar [buku ber ISBN]	Wahid Hasyim University Press	2013
2	Memahami potensi lokal, bersaing di pasar global [buku ber ISBN]	Wahid Hasyim University Press	2013
3	"Membaca" HI: dari perang antar negara hingga pembagian lokal	Wahid Hasyim University Press	2013
4	Isu-isu Perdagangan Internasional	Wahid Hasyim University Press	2014

FAIR TRADE: Perdebatan teoritik, praktik dan transformasi

Rezim perdagangan dunia yang mewujud dalam eksistensi WTO, IMF, World Bank dan aneka regulasi yang mereka produksi dengan sangat tegas mendisain perdagangan bebas (*free trade*) dunia. Para pendukung *free trade* meyakini bahwa mekanisme perekonomian tersebut berpotensi menciptakan kesejahteraan global, melalui apa yang disebut Adam Smith sebagai *invisible hand*.

Namun demikian sulit disangkal bahwa praktek *free trade* menyisahkan banyak cerita memilukan. Kesenjangan perekonomian global dan eksploitasi, kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan multi nasional sebagai salah satu pilar penting *free trade*, pelanggaran hak buruh dan konsumen, aneka permasalahan *gender* serta berbagai masalah lainnya seringkali bermuara pada praktek perdagangan yang mengabaikan nilai-nilai keadilan. Dari konteks inilah maka muncul gerakan alternatif perdagangan global, yang lazim kita dengar dengan istilah: *fair trade* atau perdagangan adil.

Sugiarto Pramono, setelah menamatkan MA. Futuhiyyah 1 Mranggen Demak pada tahun 2001, Penulis melanjutkan studinya di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), selesai tahun 2005. Melanjutkan studi S2 di FISIP UGM pada Jurusan yang sama di tahun 2010 dan lulus pada tahun 2012. Sekarang penulis aktif mengajar di FISIP UNWAHAS, aktif menulis buku-buku tentang Hubungan Internasional, dan menjadi tutor pada pendidikan politik pemula.



**Wahid Hasyim
University Press**

ISBN 978-602-8273-48-0

